

346.077  
AMG  
p 2

**PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG  
DALAM PRAKTEK PERBANKAN  
DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG**



**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Fenny Anggraeni, SH**

**B4B. 000.131**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
OKTOBER  
2002**

# **TESIS**

## **PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

Disusun oleh :

**Fenny Anggraeni, SH**

**B4B. 000. 131**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 29 Oktober 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing Utama

  
(H. ACHMAD BUSRO, SH. MHum.)

Pembimbing Kedua

  
(R. SUHARTO, SH. MHum.)

Ketua Program Studi,  
Magister Kenotariatan

  
(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2002

Yang menyatakan,



**Fenny Anggraeni, SH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan berjudul : **“PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti

bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum* dan Bapak *R. Suharto, S.H., MHum*, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadi Saputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
3. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
4. Bapak *R. Suharto, S.H. MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

5. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
6. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan
7. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000, khususnya ***Faizal Agus Widodo, SH. MKn.*** kekasihku tersayang dan tercinta yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis hingga penyelesaian tesis ini.
8. Pada kesempatan ini penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada Papa ***Drs. H. Varchan Sahli Sapoetro*** dan Mama ***Soeharningsih*** yang selalu penulis cintai karena atas berkat doa restunya yang tiada henti penulis rasakan mengiringi dalam perjalanan hidup.

Guna penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis sangat mengharapkan kritikan, sumbangan pikiran serta saran-saran. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

## ABSTRAK

Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Praktek Perbankan di Pemerintah Kota Semarang. *Fenny Anggraeni*, SH. Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam Fatwa Mahkamah Agung ditentukan bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang harus merupakan pernyataan dari debitur mengenai pengakuan berhutang kepada kreditur atas sejumlah uang tertentu yang bersifat murni dan bersifat eksepsional.

Berawal dari Fatwa Mahkamah Agung tersebut dalam praktek sering menimbulkan perbedaan persepsi oleh praktisi hukum sehingga mempengaruhi pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang terutama dalam praktek perbankan karena sistem pengeluaran dan penerimaan dalam perjanjian kredit perbankan berbeda dengan perjanjian hutang biasa. Akibatnya seringkali eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang tidak berhasil karena pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang kurang memahami Fatwa Mahkamah Agung tersebut.

Ketidakberhasilan permohonan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang itu sebagian besar disebabkan karena jumlah hutang debitur yang dimohonkan eksekusi tidak pasti atau tidak dapat dipastikan dengan mudah, selain sebab tersebut sebab yang lain yang mengakibatkan kalangan Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah adanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian seperti bunga, denda dan jangka waktu.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 224 HIR dan Fatwa Mahkamah Agung tersebut yang mengatur mengenai grosse akta pengakuan hutang sehingga memenuhi kebutuhan perbankan yang perkembangannya semakin pesat.

## ABSTRACTS

The Implementation of Debt Avowal Document Gorse in Banking Practice in the Local Government of Semarang. Fenny Anggraeni, SH. Thesis postgraduate Program, Master of Notaries of University Diponegoro Semarang.

In Supreme Court's Instruction it has been already determined that a debt avowal document gross must be a statement from debater about which avowal of owing to creditor to the amount of fixed money that has characteristic of pure and exceptional.

Starting from the Supreme Court's Instruction, in the practice it is often creates perception different among law practitioner so that it influences the exploitation of debt avowal document institution especially in banking credit because expenditure and revenue system in banking credit agreement is different with common debt agreement. Consequently the execution on debt avowal document gross often does not succeed because the related parties in the making of debt avowal document less understand the Supreme Court's Instruction.

The unsuccessfulness of execution application for debt avowal document gross in mostly caused by the uncertainty of the amount of debater debt appealed to be executed and it cannot be determined easily. Besides of a such reason, the other reason which causes court of first reason circle refuses the execution application of debt avowal document gross is the existence of debt avowal document which has no pure substance's characteristic, that are the existing of stipulations such as interest, fine and time span.

To maximize the exploitation of debt avowal document gross institution, it is necessary to finish The Article no 224 HIR and the Supreme Court's Instruction which regulates about debt avowal document gross that they are able to fulfill banking need which has rapidly development.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Akta .....	11
A.1. Pengertian Akta .....	11
A.2. Bentuk-bentuk Akta .....	12
A.3. Kekuatan Pembuktian Akta .....	14
B. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta .....	17
B.1. Pengertian Grosse Akta .....	17
B.2. Bentuk Grosse Akta .....	19
B.3. Asas Grosse Akta .....	20

C. Tinjauan Umum Tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	21
C.1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	22
C.2. Syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	22
C.3. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	37
A. Metode Pendekatan .....	37
B. Spesifikasi Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Teknik Sampling .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisa Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Hasil Penelitian .....	43
A.1. Bentuk Perjanjian yang Dipilih oleh Bank untuk Pengikatan Hutang .....	43
A.1.1. Berdasar Praktek dalam Perbankan .....	43
A.1.2. Berdasar Praktek di kalangan Notaris .....	48
A.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	50
B. Pembahasan .....	53
B.1. Bentuk Perjanjian untuk Pengikatan Hutang oleh Perbankan.....	53

B.2. Bentuk Perjanjian untuk Pengikatan Hutang oleh Notaris .....	55
B.3. Pendapat Kalangan Pengadilan Negeri Semarang Mengenai Bentuk Perjanjian untuk Pengakuan Hutang .....	56
B.4. Upaya Hukum yang Ditempuh Bila Grosse Akta Pengakuan Hutang Tidak Dapat Langsung Dimintakan Eksekusi .....	56
B.5. Analisa Kasus dan Solusi.....	64
BAB V PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
RINGKASAN .....	80
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	bentuk perjanjian yang dibuat oleh Bank sebagai kreditur .....	44
Tabel 2	bentuk perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh bank .....	47
Tabel 3	perjanjian yang dibuat oleh notaris untuk pengikatan hutang .....	49

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Berbicara mengenai pembangunan yang lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lain, maka tidak bisa lepas membicarakan mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Biaya pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemberian kredit oleh lembaga keuangan berupa Bank, baik oleh bank pemerintah maupun oleh bank swasta.

Dalam memberikan kredit, bank mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan pelunasan piutang serta demi kepastian hukum. Adanya jaminan dalam pemberian kredit itu merupakan implementasi dari penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan

UPT-PUSTAK-UNDIP

pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk itu sebelum memberikan kreditnya, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur. Yang dapat dijadikan agunan adalah berupa barang, proyek ataupun hak tagih yang dibiayai oleh Bank dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yaitu pihak Bank sebagai pemberi kredit ( kreditur ) dan pihak penerima kredit ( debitur ). Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut selain berdasarkan kepercayaan juga terdapat persyaratan lain yang harus diperhatikan oleh bank mengenai keadaan debitur, yaitu:

1. Character ( watak )
2. Capacity ( kemampuan )
3. Capital ( modal )
4. Collateral ( jaminan ) , dan
5. Condition of economy ( kondisi ekonomi )

Kelima faktor tersebut disebut "The 5C's of Credit".<sup>2</sup>

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dengan pengakuan hutang pada umumnya dilaksanakan secara terpisah atau dibuat dengan dua akta yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan pengakuan hutang sebagai perjanjian tambahan. Namun ada pula pengakuan hutang yang dibuat sebagai

---

<sup>2</sup> Mgs.Eddy Putra Tje'man, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta 1989, h.12

perjanjian pokoknya dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan pengembalian hutang tersebut dari debitur kepada kreditur termasuk pula tentang perjanjian kreditnya, syarat pengembalian dan denda keterlambatan pengembalian kredit. Perjanjian kredit biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank dan debitur hanya mengisi formulir tersebut. Perjanjian demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian kredit merupakan perjanjian intern antara debitur dengan bank sebagai kreditur.

Menurut M. Yahya Harahap, meskipun pada dasarnya dalam memberikan kredit telah meneliti berbagai segi dengan seksama, tetapi tidak terlepas kemungkinannya bahwa debitur melakukan suatu wanprestasi dengan tidak membayar atau melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ini memberikan hak dan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi penjualan lelang barang jaminan berdasar Pasal 224 HIR karena perjanjian kreditnya dituangkan atau diikuti perjanjian pengakuan hutang yang kemudian dikeluarkan grossnya (grosse akta pengakuan hutang).<sup>3</sup>

Sehingga dalam perjanjian kredit, khususnya antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, bank disamping melakukan pengikatan secara yuridis atas harta benda milik debitur melalui lembaga jaminan yang ada, kreditur juga meminta debitur untuk membuat perjanjian dalam bentuk

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jkt 1989, h.196

akta otentik yang berupa akta pengakuan hutang yang nantinya dikeluarkan grosse akta pengakuan hutang.

Grosse akta adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus. Grosse akta ini berbeda dengan akta-akta notaris yang lain, sebab disamping merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR. Masalah perkreditan tidak bisa lepas membicarakan grosse akta pengakuan hutang karena masih banyak ikatan persetujuan kredit dituangkan dalam bentuk akta pengakuan hutang. Bank selalu membuat pengakuan hutang secara notariil.

Pasal 224 HIR menentukan :

Grosse akta hipotek dan grosse surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diberi kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Hal menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana debitur berdiam, atau tinggal atau bertempat tinggal yang dipilihnya, dengan cara seperti tercantum dalam pasal-pasal permulaan bagian ini, kecuali mengenai sandera. Jika hal pelaksanaan harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang ketuanya memerintahkan itu, maka berlaku Pasal 195 ayat ( 2 ) dan seterusnya.

Berdasar bunyi Pasal 224 HIR tersebut maka yang dapat dibuatkan grossenya adalah :



### 1. Grosse akta hipotek

Sebelum berlakunya UUPA, grosse akta hipotek yang dapat dieksekusi adalah grosse akta hipotek tanah dan grosse akta hipotek kapal yang volumenya sebesar 20 meter kubik atau lebih ( Pasal 1162 KUH Perdata jo Pasal 314-315e KUHD ). Setelah berlakunya UUPA, untuk jaminan hutang yang berupa hak atas tanah, eksekusi dilakukan atas sertifikat hipotek. Sejak berlakunya UU Hak Tanggungan maka ketentuan hipotek sepanjang yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan tidak dapat diberlakukan lagi dan sebagai gantinya adalah sertifikat hak tanggungan seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT : “ sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah.”

### 2. Grosse Akta Pengakuan Hutang

Suatu surat pengakuan hutang merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual yang pada praktek perbankan diwujudkan dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang berisi persetujuan Bank sebagai kreditur untuk memberikan kredit pada debitur dengan segala persyaratannya. Jika debitur setuju maka dibuat Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian tambahan berupa pengakuan hutang, pengikatan jaminan dan kuasa untuk memasang jaminan. Akta pengakuan hutang biasanya oleh kreditur bank dibuat secara notariil karena kemudian dapat dimintakan grossenya kepada

notaris. Dasar hukum Pengakuan Hutang adalah Pasal 38 PJN, Pasal 224 HIR dan Surat MA tgl 16 April 1985 No. 213/ 229/ 85/ II.

Mengenai Pengakuan Hutang ini terdapat penafsiran dari Mahkamah Agung ( selanjutnya disebut Fatwa MA ) yang tertuang dalam suratnya tertanggal 16 April 1985 No. 213/ 229/ 85/ II / UM-TU / Pdt, yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari kantor pengacara Gani Djemat & partner, selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 maret 1986 No. 133/ 154/ 86/ II / UM-TU / Pdt pada Direksi BNI 1946, yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa pengertian Surat Hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR adalah suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.<sup>4</sup>

Dari pernyataan MA tersebut maka grosse surat hutang notariil yang dimaksud Pasal 224 HIR adalah :

- a. Grosse akta pengakuan hutang
- b. Besarnya uang yang harus dilunasi dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti dan tidak ada lagi suatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal hutangnya.
- c. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

---

<sup>4</sup> Media Notariat No.26-27 Th. VIII Jan-April 1993, h.83

- d. Penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan grosse akta merupakan pengecualian dari asas peradilan, yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasar gugatan.

Berawal dari Fatwa MA tersebut dalam praktek sering menimbulkan perbedaan persepsi oleh para praktisi hukum sehingga dapat mempengaruhi terhadap pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang terutama dalam praktek perbankan kiranya sulit untuk membuat akta yang demikian pasti jumlah hutangnya karena sistem pengeluaran dan penerimaan dalam perbankan berbeda dengan perjanjian hutang biasa.

Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dalam praktek perbankan di Pemerintah Kota Semarang.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar pembahasan tesis ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya maka perlu diadakan pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Dalam tesis ini akan dibahas mengenai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang pada praktek perbankan di Pemerintah Kota Semarang.

Dengan adanya pembatasan masalah seperti tersebut di atas maka permasalahan dalam tesis ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk akta pengakuan hutang yang dipilih oleh Bank dengan debiturnya ?
- b. Faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang ?
- c. Bagaimanakah upaya hukum yang harus ditempuh bila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dibuat oleh bank dalam pengikatan hutang dengan nasabah debiturnya
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat praktis

- a. Bagi pemegang kekuasaan legislatif mendapat masukan untuk menyempurnakan peraturan mengenai grosse akta pengakuan hutang

- b. Bagi notaris, pengacara dan kreditur yang berkepentingan mendapat masukan tentang kondisi idiil grosse akta pengakuan hutang.

Manfaat teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata materiil yang bersangkutan dengan grosse akta pengakuan hutang.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat di dalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan landasan teori untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Bagian ini membicarakan mengenai akta-akta, grosse akta sendiri termasuk didalamnya grosse akta pengakuan hutang, mengenai kredit perbankan dan menyinggung pula mengenai jaminan.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pencandraan atau penggambaran yang lebih terinci mengenai obyek dan metode penelitian yang berkaitan dengan judul tesis ini. Metodologi Penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik

penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang bentuk perjanjian yang dipilih oleh bank untuk pengikatan hutang, faktor penghambat kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang dan tindakan yang dilakukan bank bila debitur wanprestasi sehubungan dengan pembuatan grosse pengakuan hutang.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil penelitian dan saran yang didasarkan atas penelitian ilmiah yang bertalian erat dengan masalah dan tujuan studi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Akta

##### A.1. Pengertian Akta

Sebelum membahas mengenai grosse akta, terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian akta. Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”.

A. Pitlo mengartikan akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>1</sup>

A.Kohar mengartikan akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti karena menurut ketentuan hukum, barang siapa mengatakan sesuatu harus membuktikan kebenarannya.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, bahwa akta dalam suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>3</sup>

Dengan demikian tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

- a. Surat itu harus ditandatangani
- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak / perikatan

---

<sup>1</sup> A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Internusa Jkt 1978, h. 52

<sup>2</sup> A.Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung Alumni 1983, h. 6

<sup>3</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta 1985, h. 27

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian akta pada umumnya adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Atau dapat dikatakan akta adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

## **A.2. Bentuk- bentuk Akta**

Menurut ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, akta dapat dibedakan menjadi :

a. Akta Otentik ( Authentic Acta )

Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya ( Pasal 1868 KUH Perdata ).

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Dalam Pasal 1 Stbl. 1860 No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, disebutkan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum khusus yang



satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan / dikecualikan kepada pejabat / orang lain”.

Dari pengertian akta otentik tersebut di atas maka ada beberapa unsur penting dalam suatu akta otentik, yaitu :

- Bahwa akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
- Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka akta otentik ada dua macam, yaitu :

01. Akta yang dibuat oleh pegawai umum yang ditunjuk oleh UU, disebut akta ambtelijk yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang
02. Akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh UU yang disebut akta partij ( akta pihak ) yaitu akta yang memuat apa yang dikehendaki para pihak yang bersangkutan sedangkan notaris menegaskan dalam suatu akta.

b. Akta di bawah tangan

Merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum akta atau dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.<sup>4</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta atau jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

### A.3. Kekuatan Pembuktian Akta

a. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Terhadap kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi : “ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang yang mandapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. “

Dikatakan mempunyai “bukti sempurna” karena akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan bukti dan dikatakan pula bahwa akta otentik itu mengikat karena apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya

---

<sup>4</sup> Victor Situmorang & Cormentya, *Grosse Akta dalam Pembuktian & Eksekusi*, Rineka Cipta, h.36

oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.<sup>5</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang – undang :

- Bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian
- Bahwa harus ada tugas yang dibebankan oleh ketentuan UU kepada pejabat atau orang-orang tertentu
- Bahwa ada pemberian kekuatan pembuktian oleh ketentuan UU kepada akta-akta yang dibuat olehnya tersebut

Oleh karena itu maka dibebankan tiga kekuatan pembuktian suatu akta otentik :

#### ( 1 ) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik artinya dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.

#### ( 2 ) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Op.cit* , h.29

notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin :

- Kebenaran tanggal dari akta itu
- Kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu
- Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- Kebenaran tempat di mana akta itu dibuat

( 3 ) Kekuatan pembuktian Material

Isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak dari mereka. Akta itu apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu minta tanda pembuktian lain.

b. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan bukan merupakan suatu bukti dari suatu perbuatan hukum, melainkan adalah perbuatan hukum sendiri yaitu pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan dalam bentuk yang dapat dilihat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1878 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Yang dimaksud dengan permulaan pembuktian suatu tulisan dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata yaitu segala akta tertulis

yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta**

### **B.1. Pengertian Grosse Akta**

Di dalam kamus hukum yang disusun oleh Mr. Fockema Andrea disebutkan bahwa grosse akta adalah salinan pertama dari akta otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minuut) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan.

Mengenai definisi grosse akta, Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa : "Grosse adalah salinan dari suatu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa."<sup>7</sup>

Menurut Lumban Tobing, Grosse adalah salinan atau ( secara pengecualian ) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan kata-

<sup>6</sup> Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 th. 1989, h. 176

<sup>7</sup> Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Ghalia Jkt, h.98

kata: "diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal penerimaannya.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR disebutkan bahwa yang dimaksud grosse akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari semua pendapat dan ketentuan mengenai pengertian grosse akta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa grosse akta mengandung unsur-unsur :

- a. Kepala grosse harus memakai di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa"
- b. Isi grosse pada prinsipnya memuat seluruh isi minuta akta walaupun dalam perjanjian tertentu grosse akta dapat hanya memuat sebagian isi minuta akta ( Pasal 41 ayat ( 3 ) PJN )
- c. Bagian penutup grosse akta memuat kata-kata "diberikan sebagai grosse pertama" serta penyebutan nama orang yang meminta. Penyebutan kata "pertama" pada bagian penutup berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan grosse kedua dan seterusnya ( diatur dalam Pasal 42 PJN )

---

<sup>8</sup> GHS.Lumban Tobing , *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jkt 1996, h. 277

- d. Grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan grosse akta dengan turunan lainnya

## **B.2. Bentuk Grosse Akta**

Dalam Pasal 224 HIR mengenal dan mengandung dua bentuk grosse akta yaitu grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. Kedua bentuk grosse akta tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri tidak boleh ada dicampur dalam satu obyek hutang yang sama. Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian kredit sudah memilih salah satu bentuk kedua grosse tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian pengakuan hutang, demikian pula sebaliknya.<sup>9</sup>

Bentuk grosse akta apabila dihubungkan dengan cara pembuatannya di hadapan pejabat tertentu yang berupa akta otentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dan grosse akta Hak Tanggungan yang berupa sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kotamadya/Kabupaten Dati II dimana tanah terletak.

Keadaan yang ada di Indonesia dewasa ini, akta-akta yang dapat dikeluarkan grossenya adalah akta pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan yang berdasarkan Pasal 14 ayat ( 3 ) UU Nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti grosse akta hipotik, untuk tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

---

<sup>9</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademi Presindo Jkt 1987, h. 32

### B.3. Asas Grosse Akta

#### a. Grosse akta bersifat assesoir

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk grosse akta, dengan tujuan :

- memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang
- serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta executorial verkoop atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa.

Antara grosse akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan

#### b. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi ( executorial kracht ) grosse akta. Asa ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.

- #### c. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



Apabila semua syarat grosse kata dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta
- Asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi grosse akta.

- e. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua PN

Berdasarkan asas ini executorial verkoop berdasar grosse akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang ( debitur ) bertempat tinggal atau berdiam.<sup>10</sup>

Asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR.

### **C. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang**

#### **C.1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Hutang**

Definisi grosse akta pengakuan hutang di bawah ini berdasarkan definisi grosse akta dan pendapat dari Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan grosse akta pengakuan hutang adalah :

“ Salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan, yang pada bagian atasnya memuat kata-kata : “

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9 th. 1988, h. 109

ESA “, dan menggunakan judul “ Pengakuan Hutang “ sedang pada bagian penutup memuat kata-kata “ diberikan sebagai grosse pertama “ dengan menyebut nama dari yang memintanya, untuk siapa grosse tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur. <sup>11</sup>

### C.2. Syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang

Supaya nilai kekuatan eksekusi ( *executorial kracht* ) langsung melekat pada grosse akta, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan peraturan. Mengenai syarat sahnya grosse akta dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil grosse akta pengakuan hutang terdiri dari :

- a. Grosse akta pengakuan hutang pada bagian kepala harus memuat irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.
- b. Menggunakan judul “ Pengakuan Hutang “ dan pada bagian bawahnya dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama”.
- c. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akta pengakuan hutang tersebut diberikan.
- d. Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta pengakuan hutang.

---

<sup>11</sup> Soetarno Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Hutang & Grosse Akta Hipotek*, Media Notariat No.8-9 Th. 1998 h.166

Sedangkan syarat materiil dari grosse akta pengakuan hutang adalah bahwa grosse akta pengakuan hutang hanya berisi pernyataan berhutang jumlah tertentu oleh debitur kepada kreditur atau kewajiban pembayaran kembali jumlah hutang tertentu secara pasti. Di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.<sup>12</sup>

### Syarat Bentuk dan Syarat Isi

#### 01. Kepala Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pada bagian kepala memuat kata-kata : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ( Pasal 224 HIR jo Pasal 41 ayat ( 2 ) PJN ). Apabila pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka grosse akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila notaris lupa atau lalai mencantumkan kata-kata tersebut dalam kepala grosse akta pengakuan hutang maka notaris akan dikenai sanksi denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat ( 2 ) PJN.

#### 02. Nomor Grosse Akta Pengakuan Hutang

Nomor grosse akta pengakuan hutang sama dengan nomor akta otentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam PJN yang menerapkan sanksi bagi notaris yang tidak mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta tentunya dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi notaris sendiri untuk membantu arsipnya.

---

<sup>12</sup> Ny. Subagio Reksodipuro, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9 Th. 1988, h. 158

### 03. Judul Akta

Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan notaris dan para pihak yang membuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, pencantuman judul "Pengakuan Hutang" tentunya mampu memperlançar eksekusi, daripada dengan menggunakan judul lain seperti "kesanggupan untuk membayar"

### 04. Awal Akta Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pada awal akta grosse akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan notaris serta saksi - saksi instrumentair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta notaris hanya sebagai akta dibawah tangan ( Pasal 22 ayat ( 2 ) jo Pasal 25 ayat ( 3 ) PJN ).

### 05. Komparisi

Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh notaris. Jika yang dibuat oleh notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan notaris mengenai para penghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, grosse akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi grosse akta pengakuan hutang notariil

adalah keterangan notaris mengenai penghadap yang menghendaki dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak ( Pasal 25 ( 3 ) PJN ).

#### 06. Premis

Dalam PJN tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta otentik. Pada bagian premis grosse akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya pengakuan hutang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

#### 07. Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang

- pengakuan hutang sepihak oleh debitur
- kewajiban membayar sejumlah uang tertentu
- dalam jangka waktu tertentu
- tempat pembayaran
- opeisbaarheid ( dapat ditagih )

#### C.3. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Istilah eksekusi dalam literatur Hukum Acara Perdata adalah “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi ini dapat pula dapat diartikan “menjalankan putusan” pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah

UPT-PUSTAK-UNIP

tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain putusan hakim ( vonnis ), tulisan-tulisan yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam Pasal 224 HIR juga dapat dieksekusi yaitu :

01. grosse surat hutang notariil ( grosse akta pengakuan hutang ), yang dilakukan tanpa jaminan hipotik
02. Benda jaminan hipotik dan grosse akta hipotik ( sertifikat hipotik ) yang dilakukan terhadap jaminan hipotik.

Yang dimaksud dengan mempunyai “kekuatan seperti putusan hakim” dalam Pasal 224 HIR adalah kekuatan eksekutorial. Hal tersebut terlihat dari kalimat kedua yang menyatakan “ hak menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”, dan letak Pasal 224 HIR itu sendiri di dalam Bab IX Bagian Kelima tentang pelaksanaan putusan hakim.

Pada pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang, debitur harus sudah wanprestasi dan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana keputusan Mahkamah Agung No. 3210 K/ Pdt 1984 tanggal 30 Oktober 1986. Pengajuan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dalam praktek dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian pihak yang bersangkutan membayar biaya eksekusi yang ditentukan oleh panitera Pengadilan Negeri.

Sebelum eksekusi itu dijalankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

a) Aanmaning ( teguran ) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR :

“ Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan baik dengan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara supaya putusannya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah supaya menghadap di mukanya dan ia memperingatkan padanya supaya dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama delapan hari melaksanakan putusan itu.” Dari ketentuan Pasal 196 HIR tersebut maka dapat diketahui bahwa pengadilan sebelum menjalankan eksekusi harus terlebih dahulu melakukan teguran. Dalam prakteknya teguran dilakukan sampai dua atau tiga kali.

b) Sita Eksekusi ( Pasal 197 HIR )

Jika telah lewat waktu delapan hari setelah peneguran tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga mau menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan tersebut telah dipanggil untuk ditegur dengan patut tidak juga menghadap Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang orang yang dikalahkan ( debitur ) atau barang-barang yang menjadi obyek sengketa guna kepentingan menjalankan putusan lebih lanjut, penyitaan ini disebut sita eksekusi. Sita eksekutorial

tidak lagi diperlukan apabila sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim, pihak kreditur telah meletakkan sita pendahuluan ( conservatoir beslag ) terhadap barang-barang jaminan. Hal ini karena dalam sita pendahuluan dalam putusannya telah dinyatakan sah dan berharga. Setelah dilakukan penyitaan kemudian dibuatkan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti dan dua orang saksi. Selanjutnya berita acara tersebut diberitahukan kepada kepala desa atau lurah dengan maksud agar barang tersebut tidak dipindahtangankan oleh orang yang dikenai eksekusi ( Pasal 198 HIR ).

Ketua Pengadilan Negeri melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat dimana eksekusi akan dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dengan memperhatikan perikemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 serta Pasal 195 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2) HIR.<sup>13</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Kredit Perbankan**

### **D.1. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti kepercayaan. Jadi dasar kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur

---

<sup>13</sup> Victor Situmorang & Comentyna, *op.cit* , h. 122



bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Pendirian pengertian kredit menurut Mr. J.A.Levy adalah :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Ajaran Levy sudah mengkhususkan arti hukum dari “kredit” yaitu perjanjian pinjam uang. Kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut di kemudian hari. Ukuran yang dipergunakan Levy untuk kepercayaan itu adalah “kemampuan ekonomi” si debitur.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “kredit” adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian kredit di atas dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kredit bank, yang terdiri dari :

- a. Ada perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis
- b. Ada dua pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur

---

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung 1983, h. 23

- c. Ada hak dan kewajiban dari masing - masing pihak, yaitu bahwa pihak bank berkewajiban untuk menyediakan uang dan berhak untuk menerima pelunasan beserta bunga dan di pihak lain debitur berhak untuk menerima piutang dan berkewajiban untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan bunga.<sup>15</sup>

Jika Pasal 1 ayat ( 11 ) UU Perbankan tersebut diperhatikan maka di dalamnya terkandung “ kewajiban mengembalikan piutang atau kredit “. Dari segi yang lebih luas lagi kewajiban untuk memenuhi perikatan sehingga sebelum memberikan kreditnya, pihak bank akan melakukan serangkaian kegiatan yang disebut analisa kredit. Dengan analisa kredit dapat diperoleh gambaran bahwa kredit yang akan disalurkan dapat diterima oleh pihak yang tepat. Sehingga resiko adanya kredit macet akan dapat dikurangi. Analisa kredit membantu pihak perbankan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam.

Pendekatan analisa kredit yaitu dengan “The 5 C’s of Credit yang terdiri dari Collateral, Character, Capacity, Capital dan Condition of Economic, adalah paling umum dipakai sebagai pedoman. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

*Collateral* melihat apakah calon debitur telah mempunyai jaminan yang memadai atau tidak, baik dilihat dari nilai ekonomis ataupun nilai yuridis. Jaminan dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

---

<sup>15</sup> Teguh Pudjo Mulano, Manajemen Perkreditan bagi Bank-bank Komersial, h.13

*Character*, menilai watak calon debitur dengan melihat kredibilitasnya, moralnya, itikad baiknya, segi kejiwaannya, pergaulannya di masyarakat, reputasi usahanya, dan sebagainya yang berhubungan dengan karakter debitur.

*Capacity* menilai calon debitur dengan melihat pada kemampuannya melunasi hutang. Kemampuan dilihat dari sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan debitur dan juga dari likuidasi barang-barang jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur. Dan juga dilihat dari kemampuan manajemen, sumberdaya yang dimiliki, produksi, pemasaran, keuangan dan adaptasi dengan lingkungan sekitar.

*Capital* melihat aspek permodalan calon debitur seperti besarnya modal yang dimiliki, besarnya sisa laba, keseimbangan modal sendiri dengan pinjaman.

*Condition of Economic* melihat aspek ekonomi dari lingkungan sekitar calon debitur seperti kondisi perekonomian nasional, tingkat inflasi dan prospek dari industri yang digeluti.

## **D.2. Jenis Kredit**

Dalam praktek secara umum ada dua jenis kredit yang diberikan bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit ditinjau dari segi jangka waktunya.

Kredit ditinjau dari segi penggunaannya dapat berupa :

### **a. Kredit Produktif**

yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdapat dua macam, yaitu:

- Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan
- Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan

**b. Kredit Konsumtif**

Yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

Sedangkan kredit ditinjau dari segi jangka waktunya adalah :

- a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun
- b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun
- c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.<sup>16</sup>

**D.3. Dasar Hukum Kredit**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit bank di Indonesia tergolong dalam Perjanjian Bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk pada UU Perbankan dan Bagian Umum Buku III KUH Perdata. Dalam

---

<sup>16</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, h.97

aspeknya yang riil, perjanjian ini tunduk pada UU Perbankan dan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam model perjanjian ( standar ) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan. Perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUH Perdata.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Munir Fuady, dasar hukum perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara pihak-pihak ( Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata ), UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, praktek kebiasaan dalam perbankan dan Yurisprudensi. Perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian baku dengan di sana sini ada penyesuaian seperlunya. Bank mempunyai form sendiri, para pihak tinggal mengisi data pribadi dan data tentang loan yang diambil.<sup>18</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya “memberi sesuatu”, mengenai “prestasi” atau sesuatu yang dapat dituntut dari salah satu pihak seperti tertulis di dalam Pasal 1234 KUH Perdata , adalah :

- a. menyerahkan sesuatu
- b. melakukan / berbuat sesuatu
- c. tidak melakukan sesuatu

Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi karena kesalahannya menurut ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal itu dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan terhadap hal tersebut dapat dituntut baik secara *parate executie* ( pelaksanaan tuntutan tanpa melalui hakim ) maupun secara *rele executie* ( pelaksanaan tuntutan melalui hakim ) atau secara *arbitrage* ( perwasitan ).

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, h. 40

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bandung 1996, h. 7

Jadi bahwa terhadap perjanjian kredit akan diberlakukan ketentuan yang sama seperti perjanjian pinjam mengganti sehingga akan terlihat bahwa perjanjian kredit merupakan hal yang khusus dari perjanjian pinjam mengganti. Adapun kekhususan dari perjanjian kredit adalah :

- a) Perjanjian kredit terjadi dalam perjanjian pinjam uang saja, sedangkan perjanjian mengganti berlaku untuk semua barang yang sifatnya dapat dihabiskan karena dipakai.
- b) Perjanjian kredit menurut UU Perbankan terjadi antara bank dengan nasabah debiturnya, sedangkan perjanjian pinjam mengganti menurut KUH Perdata terjadi di mana saja pada masyarakat umum.
- c) Pada perjanjian kredit ditetapkan suatu jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu tersebut dikenakan bunga yang telah ditentukan menurut perjanjian, sedangkan dalam perjanjian pinjam mengganti tidak selalu terjadi dalam jangka waktunya dan dapat pula terjadi dengan atau tanpa bunga antara peminjam dengan yang meminjamkan barang tersebut. Dilihat dari sifatnya perjanjian pinjam mengganti tidak ada unsur komersial.<sup>19</sup>

#### **D.4. Kedudukan Jaminan Kredit**

Dalam praktek perbankan, penilaian kredit harus diarahkan untuk dapat memperkecil resiko. Bila resiko diperkirakan kecil, maka syaratnya diperingan dan sebaliknya apabila kredit tersebut diperkirakan beresiko besar, maka syaratnya diperberat termasuk dalam hal suku bunga.

---

<sup>19</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Eksekusi Grosse Akta Hipotik oleh Bank*, Rineka Cipta Jkt, h. 8

Untuk dapat mengikat debitur agar tidak ingkar janji, maka salah satu jalan yang ditempuh oleh bank ( kreditur ) adalah dengan mensyaratkan adanya jaminan dari debitur. Jaminan kredit menurut tingkatannya dapat dibedakan menjadi dua :

a. Jaminan Primer ( Jaminan Pokok )

Jaminan primer adalah hasil ( kelayakan ) usaha plus obyek atau barang yang dibeli dengan kredit tersebut sebagai jaminan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Undang- undang Pokok Perbankan. Sehingga jaminan primer bersifat mutlak.

b. Jaminan Sekunder ( Jaminan Tambahan )

Jaminan sekunder adalah jaminan lainnya di luar obyek atau barang yang dibiayai bank, dapat berupa barang milik sendiri atau milik orang lain. Jaminan sekunder ini dapat berupa tanah, bangunan, mesin pabrik dan sebagainya.<sup>20</sup>

Di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan pemberian jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tersirat dari Pasal 8 dan Pasal 12 UU Perbankan bahwa Bank tidak dapat memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “ Segala kebendaan berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ”.

---

<sup>20</sup> Rustam Effendy, *Kedudukan dan Fungsi Jaminan Kredit bagi Bank*, h. 1

Dalam praktek sering kreditur merasa tidak puas dengan jaminan secara umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, sehingga kreditur menghendaki adanya benda tertentu milik debitur yang dapat dijadikan jaminan bagi kredit yang diberikan. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi, kreditur mempunyai kepastian dan kemudahan untuk melaksanakan haknya terhadap debitur dengan melelang benda jaminan tersebut.

Perjanjian pemberian jaminan bersifat aksesoir ( tambahan ) yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Apabila perjanjian pokok berakhir atau hapus maka perjanjian jaminan ikut berakhir.

Jaminan yang dikehendaki oleh bank sebagai kreditur adalah jaminan yang berhasil dan berdaya guna artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada kreditur dan mudah dijual guna menutup kredit yang tidak dapat dilunasi debitur.



### **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka Metode Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>1</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian merupakan proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu dimana dalam hal ini langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diharapkan agar penelitian mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan tidak meragukan.<sup>2</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jkt 1984, h. 6

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jkt, h. 20

kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer ( hasil penelitian di lapangan ) untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang dalam praktek perbankan.

Penelitian hukum yang mempergunakan metode pendekatan yuridis mempunyai kemampuan dan jangkauan yang hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Dan dengan bantuan ilmu sosial, penelitian ini diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya semua metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu sosial.<sup>3</sup>

Dengan mengikuti pula yang berlaku dalam penelitian ilmu sosial, penelitian hukum yang empiris berpangkal pada perumusan masalah melalui penetapan obyek, menganalisa mengenai pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi.

Oleh karena itu dalam penelitian untuk menyusun tesis ini, penulis menggabungkan kedua penelitian tersebut sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dinamakan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 37

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, digunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri-ciri, keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta menemukan gejala. Penelitian ini tanpa didahului dengan hipotesis-hipotesis.

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif tidak hanya dilakukan pengolahan data dan penyusunan data, tetapi yang terpenting juga adalah analisa data dan interpretasi data yang telah didapat agar diketahui maksudnya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian untuk penyusunan tesis ini lokasi penelitiannya adalah di wilayah Pemerintahan Kota Semarang

## **D. Teknik Sampling**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Bank di seluruh Pemerintah kota Semarang.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu,

karena subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pengikatan perjanjian pengakuan hutang tersebut dan nara sumber yang dimiliki mampu memberikan pandangan mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang. Dalam penelitian ini sampel diambil dari sebagian populasi.

Dalam penelitian ini maka sampelnya adalah :

- Bank BPD Jateng Cabang Utama Semarang,
- Bank Niaga Semarang Pemuda
- Bank BNI Cabang UNDIP

dengan alasan ketiga bank tersebut telah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan perbankan yang salah satunya adalah memberikan fasilitas kredit. Dimana dalam memberikan fasilitas kredit, ketiga bank tersebut meminta debiturnya untuk membuat surat pernyataan berhutang yang kemudian dibuatkan grossenya oleh notaris.

Sedangkan responden penelitian terdiri dari :

- Lima orang notaris
- Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- Kepala Bagian Kredit Bank BPD Jateng Cabang Utama Semarang
- Kepala Bank BNI Cabang UNDIP Semarang
- Sub Legal Manager Bank Niaga Semarang Pemuda

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep , teori - teori, pandangan atau penemuan - penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan sarjana hukum, dan sebagainya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kepustakaan ini yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku karangan ilmiah para sarjana, makalah, bahan kuliah dan kamus yang semuanya berkaitan erat dengan masalah grosse akta pengakuan hutang.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka pewawancara dengan yang diwawancarai. Di dalam wawancara ini digunakan metode wawancara terarah yaitu suatu cara atau jalan bagi peneliti untuk memelihara suatu derajat pengendalian

tertentu terhadap wawancara yang dilakukannya. Cara ini menimbulkan berbagai pengarah dan struktur, tetapi hal ini tidak berarti wawancara dilakukan secara kaku. Penulis dalam melakukan penelitian ini harus terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan dengan dimungkinkannya adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Data yang terkumpul di analisa untuk mendapatkan kejelasan masalah apa yang akan dibahas. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut :

##### **1. Editing**

Editing adalah penelitian atau pengecekan terhadap data dan bahan-bahan yang masuk. Dalam proses editing ini dilakukan pembentukan data yang salah, menambahkan dan melengkapi data yang belum lengkap.<sup>4</sup>

##### **2. Interpretasi**

Data yang telah terkumpul kemudian di analisa melalui metode interpretatif dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep yang telah dikemukakan di dalam Bagian II kemudian disimpulkan secara induktif.

---

<sup>4</sup> Ibid, h. 51

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **A.1. Bentuk Perjanjian yang Dipilih oleh Bank untuk Pengikatan Hutang**

##### **A.1.1. Berdasar Praktek dalam Perbankan**

Dalam suatu Pengikatan Hutang, Bank sebagai kreditur mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada debitur sehingga kehendak Bank yang paling menentukan dalam pemilihan bentuk perjanjian untuk menuangkan pengikatan hutang yang mereka buat.

Sebelum membicarakan mengenai akta pengakuan hutang maka terlebih dahulu membicarakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank adalah suatu perjanjian yang mendasari adanya suatu grosse akta pengakuan hutang. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang otomatis harus ada terlebih dahulu, diikuti Pengakuan Hutang yang bersifat assesoir terhadap perjanjian pokok.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data sebagai berikut : dari 4 (empat) Bank selaku kreditur sebagai sampel, maka 2 Bank membuat akta perjanjian kredit dalam bentuk akta di bawah tangan atau sebesar 50%, 1 Bank membuat akta perjanjian kredit secara notariil atau sebesar 25%, dan sisanya sebanyak 1 bank dalam membuat akta perjanjian kredit ada yang secara notariil

---

<sup>1</sup> Hasil penelitian dengan 3 Bank pada bulan Juni 2002

dan ada yang dalam bentuk akta bawah tangan, dalam hal ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Data penelitian yang berasal dari empat bank tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

**BENTUK PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT  
OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Dalam bentuk akta notariil	1	25 %
2	Dalam bentuk akta di bawah tangan	2	50 %
3	Kedua-duanya	1	25 %
	N = 4		100 %

Sumber data : Data primer yang diolah

Sebelum perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk akta bawah tangan maupun akta otentik, Bank terlebih dahulu melakukan seleksi yang ketat terhadap calon debitur sehingga Bank memiliki keyakinan yang kuat atas terbayarnya kembali kredit yang telah diberikan. Seleksi terhadap calon debitur dilakukan oleh seluruh Bank berdasarkan penilaian terhadap :

- a. Watak debitur. Terutama didasarkan pada hubungan yang telah dijalin antara bank dengan debitur atau didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari.



- b. Kemampuan debitur. Dalam hal ini bank harus meneliti tentang keahlian debitur di bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
- c. Modal. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.
- d. Jaminan. Dalam hal ini bank menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, syarat berharga atau garansi resiko yang dijadikan jaminan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, jaminan tersebut dapat dipergunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.
- e. Prospek usaha debitur. Bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran hasil proyek atau usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Meskipun perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk bebas baik lisan maupun tertulis, namun bagi kalangan perbankan dalam hubungannya dengan perjanjian kredit maka perjanjian kredit selalu dituangkan dalam bentuk tertulis.

---

<sup>2</sup> Agus Sudrajat, Aspek-aspek Hukum dalam Usaha Bank, Simposium Nasional Perbankan 1993, h.7

Praktek yang demikian ini sesuai dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/ 10/ 1996 yang dengan tegas menyatakan bahwa bank wajib menggunakan Akad Perjanjian Kredit yang otomatis harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu. Bentuk perjanjian tertulis, walaupun tidak selalu berbentuk akta otentik. Perjanjian kredit yang berbentuk akta otentik sebenarnya lebih menjamin kepastian hukum apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Dari perjanjian tersebut maka pihak bank juga menghendaki agar debitur membuat Pengakuan Hutang yang kemudian oleh kreditur dimintakan grossnya kepada notaris yang bersangkutan.

Pengakuan Hutang oleh debitur biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh bank dapat berupa :

- Akta Pengakuan Hutang saja
- Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan
- Akta Pengakuan Hutang dengan SKMHT dan kuasa menjual

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap empat Bank sebagai sampel, maka diperoleh data bahwa keempat Bank tersebut semuanya membuat akta Pengakuan Hutang secara notariil. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan Fatwa MA mengenai Akta pengakuan hutang dan juga sejalan dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pengakuan Hutang dituangkan dalam bentuk akta notaris agar suatu sengketa tentang pengikatan hutang dapat diselesaikan tanpa melalui gugatan yang dapat memakan waktu lama.

Tabel 2  
BENTUK PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG  
YANG DIBUAT OLEH BANK

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Akta notariil	4	100 %
2	Akta di bawah tangan	0	0 %
	N = 4		100 %

Sumber data : Data primer yang diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semua bank sebagai responden yaitu sebanyak 4 bank, membuat Perjanjian pengakuan hutang secara notariil.

Bagi kalangan bank, pembuatan pengakuan hutang dilakukan sebelum pemberian hutang. Jumlah uang yang dipinjam oleh debitur adalah sesuai dengan jumlah hutang sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Akta pengakuan hutang dapat dimintakan pada notaris secara langsung baik oleh debitur maupun oleh kreditur dalam arti salah satu pihak datang menghadap notaris atau kedua pihak datang bersama. Pada dasarnya akta pengakuan hutang merupakan perjanjian tambahan yang sifatnya sebagai pelengkap karena tidak semua perjanjian kredit harus dilengkapi dengan pengakuan hutang. Dalam hal ini pihak bank ada kebijaksanaan dan penilaian sendiri terhadap calon debitur, bila calon debitur konditenya memang baik, aktif dalam pembayaran serta jaminannya cukup nilainya atau mudah untuk dijual maka untuk perjanjian kredit tersebut dapat tidak disertai pengakuan hutang.

Berdasarkan hasil penelitian ke kalangan perbankan, tidak semua perjanjian kredit diikuti dengan pengakuan hutang. Untuk kredit konsumtif seperti personal loan yaitu kredit yang diberikan pada pegawai negeri tidak menggunakan pengakuan hutang, sedangkan kredit yang diberikan untuk modal kerja, Rekening Koran (R/C) dan sebagainya di luar kredit konsumtif menggunakan akta pengakuan hutang.<sup>3</sup>

#### **A.1.2. Berdasar Praktek di kalangan notaris**

Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta mengenai semua perjanjian, diharuskan untuk tunduk pada KUH Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris. Selain tugasnya untuk membuat akta otentik, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam suatu perbuatan hukum perjanjian pengikatan hutang, terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur dalam hal ini Bank mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada debitur sehingga kehendak bank yang paling menentukan dalam pemilihan bentuk perjanjian untuk menuangkan pengikatan hutang yang mereka buat.

Notaris dalam hal ini, sepanjang permintaan atau kehendak para pihak tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, maka ia wajib memberikan bantuannya. Berdasar penelitian di lapangan terhadap 5 notaris, penulis melihat bahwa dalam membuat perjanjian untuk pengikatan hutang, ada notaris yang

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 1

membuat perjanjian kredit dan pengakuan hutang secara terpisah namun ada pula notaris yang membuat pengakuan hutang dan perjanjian kredit dalam 1 akta dengan judul “Pengakuan Hutang” tetapi isinya memuat ketentuan dalam perjanjian kredit.<sup>4</sup>

Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3  
PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS  
UNTUK PENGIKATAN HUTANG

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Perjanjian kredit terpisah dari pengakuan hutang	3	60 %
2	Perjanjian kredit dan pengakuan hutang dalam 1 akta	2	40 %
	N = 5		100 %

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan yang diolah

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa sebanyak 3 notaris atau sebesar 60 % membuat perjanjian kredit terpisah dari pengakuan hutang, dan sebanyak notaris atau sebesar 40 % membuat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dalam 1 akta.

Dalam proses pembuatan perjanjian pengakuan hutang bila akta pengakuan hutang tersebut telah selesai dibuat maka notaris harus membacakan aktanya berulang kali di hadapan para pihak dan saksi-saksi sehingga maksud dari

<sup>4</sup> Hasil wawancara ke 5 notaris-notaris di Semarang sebagai responden, tgl 6-8 Juni 2002

mengeksekusi secara langsung harta kekayaan debitur, tetapi untuk dikabulkannya suatu permohonan eksekusi grosse akta harus dipenuhi syarat formil dan materiil dari grosse akta.

Syarat formil grosse akta pengakuan hutang adalah :

- a. Grosse akta tersebut harus berkepala “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan-an Yang Maha Esa “
- b. Di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata “ diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan...”
- c. Nama orang yang atas permintaan grosse tersebut diberikan
- d. Tanggal pemberian akta

Sedangkan syarat materiilnya adalah di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang harus berisikan pernyataan pengakuan berhutang jumlah tertentu yang pasti oleh debitur kepada kreditur serta di dalamnya tidak diperbolehkan adanya persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Dalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokoknya.

Berdasar penelitian di lapangan, menurut kalangan Perbankan, notaris dan Pengadilan Negeri Semarang maka hal-hal yang seringkali menghambat pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang adalah :



1) Jika terjadi perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi

Menurut penafsiran dari Fatwa MA No. 213 / 229 / 85 / UM-TU / Pdt tanggal 16 April 1985 adalah bahwa di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang harus tercantum besarnya jumlah hutang yang sudah pasti yang harus dibayarkan dan tidak ada alasan hukum lagi bagi debitur untuk menyangkalnya.

Dalam praktek perbankan mungkin terjadi bahwa jumlah hutang adalah berbeda dengan antara grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataan yang ada karena debitur dalam kenyataannya baru mengambil sebagian kreditnya atau debitur telah melakukan beberapa angsuran pembayaran.

Sistem penerimaan dan pengeluaran dalam perbankan untuk pengambilan dan penyetoran kredit berbeda, apalagi jika menggunakan rekening koran, sehingga seringkali pada saat akan dilaksanakannya eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang, jumlah hutang debitur sulit ditentukan.

Penentuan jumlah hutang secara pasti juga sulit dilakukan apabila suku bunga berubah-ubah berdasar keadaan pasar pada saat itu, sehingga tiap 3 – 6 bulan sekali harus ditinjau.

2) Jika didalam suatu grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Berdasarkan Fatwa MA No. 213/ 229/ 85/ UM-TU/ Pdt tanggal 16 April 1985 maka dapat diketahui MA menganut pendirian bahwa di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang semata-mata hanya berisi pengakuan hutang saja sehingga tidak dapat ditambahkan persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Terhadap Fatwa MA tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda bagi penegak hukum, praktisi hukum dan kreditur. Berdasar penelitian di lapangan, kalangan Pengadilan Negeri Semarang berpandangan sempit bahwa persyaratan yang berupa pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda tidak diperbolehkan, sedangkan bagi para praktisi hukum dan kreditur menganggap bahwa klausula-klausula mengenai bunga dan denda harus ada. Adapula yang bertanya bagaimana bila ada suatu Perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk Pengakuan Hutang dengan diberi kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Di sinilah terletak permasalahannya yang seringkali menghambat pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Jika persyaratan seperti pelunasan piutang secara mengangsur, jangka waktu dan bunga dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa MA tersebut, maka pihak Bank sebagai kreditur tidak diperbolehkan menerima angsuran-angsuran dari pihak yang berhutang. Apakah untuk tiap angsuran yang diterima harus dibuat akta pengakuan hutang baru untuk sisa hutangnya ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Bentuk Perjanjian untuk Pengikatan Hutang oleh Perbankan**

Di dalam Hukum Perdata Materiil, suatu perjanjian timbul setelah terjadi persesuaian pernyataan kehendak. Dengan terjadinya perjanjian maka terjadilah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

---

<sup>5</sup> Wawancara ke PN Semarang, tgl 7 Juni 2002



Dalam suatu pengikatan hutang, Bank sebagai kreditur mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada debitur sehingga kehendak bank yang paling menentukan dalam pemilihan bentuk perjanjian untuk menuangkan pengikatan hutang yang mereka buat.

Sebelum membuat akta untuk pengikatan hutang, Bank sebagai kreditur mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada debitur sehingga kehendak Bank yang paling menentukan dalam pemilihan bentuk perjanjian untuk menuangkan pengikatan hutang yang mereka buat.

Sebelum membuat akta untuk pengikatan hutang yaitu akta pengakuan hutang, Bank terlebih dahulu membuat Perjanjian Kredit. Dalam membuat perjanjian kredit ada bank yang menuangkan dalam bentuk tertulis secara notariil, namun ada pula bank yang membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta bawah tangan, bahkan ada bank yang membuat perjanjian kredit secara notariil dan ada yang bawah tangan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dari perjanjian kredit tersebut diikuti pembuatan Pengakuan hutang. Dalam membuat akta pengakuan hutang, Bank dan debiturnya mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai bentuk akta pengakuan hutang sebagaimana yang dijelaskan oleh notaris kepada bank dan debiturnya ketika menghadap sehingga bank memilih bentuk pengakuan hutang secara notariil. Tindakan Bank untuk membuat pengakuan hutang secara notariil sudah benar karena sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

---

<sup>6</sup> Hasil penelitian dari 3 Bank yang diperoleh sebagai sampel di kota Semarang

### **B.3. Pendapat kalangan Pengadilan Negeri Semarang mengenai Bentuk Perjanjian untuk Pengakuan Hutang**

Kalangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bentuk akta pengakuan hutang harus notariil, sesuai ketentuan dalam KUH Perdata mengenai akta hipotik, karena mengenai pengakuan hutang tidak diatur secara jelas maka peraturan mengenai hipotik berlaku secara analogis untuk pengakuan hutang.

Begitu juga mengenai materi dari pengakuan hutang harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Fatwa MA bahwa pengakuan hutang hanya berisi pengakuan hutang semata dari pihak debitur.<sup>8</sup>

### **B.4. Upaya Hukum yang Ditempuh bila Grosse Akta Pengakuan Hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi.**

Dalam suatu perjanjian kredit antara Bank dengan debiturnya, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah mereka perjanjikan sebelumnya maka bank pada umumnya memberikan tindakan awal terlebih dahulu dengan mencari hal-hal yang menjadi sebab debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Hasil dari tindakan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar tindakan dari bank selanjutnya yang dianggap paling tepat.

Setelah pengambilan langkah atau tindakan awal tersebut dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka oleh bank dinilai sebagai kredit macet.

Menurut Surat Keputusan Direksi BI Nomor 26 / 22 / KEP / DIR dan SE BI No. 26 / 4 / BPPP, terdapat empat kriteria kolektibilitas kredit, yaitu :

---

<sup>8</sup> Wawancara ke PN Semarang, tanggal 7 Juni 2002

a. Kolektibilitas I – Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria,

- (1). Tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya
- (2). Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan sampai dengan 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 bulanan atau lebih.

Dalam hal bank puas dengan perjanjian kreditnya yang lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban mengenai bunga, angsuran hutang pokok diselesaikan oleh nasabah debitur secara baik.

b. Kolektibilitas II – Kurang Lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1). Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum sampai 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum sampai 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan atau 3 bulanan, atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.
- (2). Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan

belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

Kredit ini yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran-pembayaran bunga tidak baik serta angsuran hutang pokok pun demikian pula. Dalam hal ini usaha-usaha pendekatan telah dilakukan tetapi tetap kurang baik.

c. Kolektibilitas III – Diragukan

Kredit digolongkan sebagai diragukan jika kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian disimpulkan bahwa :

- (1). Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai paling sedikit 75 % dari hutang debitur.
- (2). Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai minimal 100% dari hutang debitur.

Merupakan kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah debitur yang bersangkutan.

d. Kolektibilitas IV – Macet

Kredit disebut macet apabila :

- (1). Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- (2). Memenuhi kriteria diragukan sebagaimana butir III, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan kredit.

- (3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada Pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Kredit materi ini merupakan kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit itu dikategorikan ke dalam kredit macet.

Terhadap Kolektibilitas II dan III bank mengadakan pembinaan terhadap debitur. Dan bila usaha pembinaan atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar tidak berhasil sehingga terjadi kredit macet, maka bank melakukan penghapusbukuan.<sup>9</sup>

Ditinjau dari KUH Perdata, yang dimaksud dengan macet adalah tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, yang dalam hal ini perjanjian kredit. Untuk perjanjian timbal balik, maka hak kreditur terhadap debitur adalah menuntut agar pinjaman tersebut dikembalikan dengan seluruh persyaratan yang terdapat dalam perjanjian-kredit-yang bersangkutan ( Pasal 1243 KUH Perdata ).

Dalam praktek, bila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta pengakuan hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MA.

Pada prinsipnya, praktek pengadilan mempergunakan dua cara dalam menjalankan isi putusan. **Pertama** adalah dengan cara sukarela dan **kedua** adalah dengan cara eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa untuk menjalankan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara ke BPD Jateng Cabang Utama Semarang, tanggal 5 Juni 2002

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan pengadilan secara sukarela.

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan asas-asas eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi perjanjian seperti tersebut diatas dengan syarat perjanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta. Dengan adanya grosse akta inilah maka apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut.

Agar suatu permohonan eksekusi berdasarkan pasal 224 HIR berhasil, permohonan tersebut harus memenuhi syarat formal maupun syarat materiil.

Agar dapat dieksekusi, suatu grosse akta pengakuan hutang harus bersifat murni, dipergunakan untuk hutang piutang tanpa jaminan yang jumlahnya kecil, serta pasti (fixed). Tetapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, grosse akta Pengakuan Hutang yang dimintakan eksekusi selalu merupakan suatu perjanjian kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, suatu grosse akta pengakuan hutang tanpa jaminan dianggap tidak mempunyai kekuatan

eksekutotial, karena eksekusi grose akta hanya dapat dilaksanakan terhadap benda jaminan, yaitu benda jaminan yang dibebani hipotek, atau hak tanggungan atau yang lain. Namun demikian grose akta dapat diterima, sepanjang grose akta pengakuan hutang itu memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 1985, nomor 213/229/85/II/Um Tu/Pdt, karena tidak semua jaminan hutang itu berupa benda tetap, tetapi dapat pula benda tidak tetap yang sudah diikat dengan fiducia atau gagal.

Menurut kalangan Pengadilan Negeri Semarang eksekusi grosse akta pengakuan hutang saja tanpa eksekusi benda jaminan jarang dilakukan, yang sering dilakukan adalah eksekusi grosse akta pengakuan hutang sekaligus diikuti eksekusi benda jaminan.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Suparti Hadyono memberi penjelasan bahwa prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya sama dengan prosedur eksekusi biasa, yaitu :

- a. Didahului dengan Aanmaning ( pemanggilan )
- b. Teguran untuk memenuhi prestasi secara sukarela dalam jangka waktu 8 hari.
- c. Bila barang, jaminan masih berada pada debitur maka bersamaan dengan Aanmaning diletakkan Sita Eksekusi
- d. Bila jangka waktu 8 hari telah lewat dan debitur belum memenuhi prestasinya maka diadakan pengumuman lelang pada surat kabar sebanyak

dua kali. Selanjutnya lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara ( KLN ).

- e. Sebelum lelang dilakukan debitur dapat mengajukan Verzet ( perlawanan ) terhadap eksekusi, jika ada kekeliruan mengenai jaminan.
- f. Begitu juga bagi pihak ketiga dapat mengajukan Verzet terhadap eksekusi jika ternyata yang akan dieksekusi adalah milik pihak ketiga. Jika ada Verzet dari pihak ketiga maka Pengadilan akan menangguhkan eksekusi.

Dalam praktek, apabila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta Pengakuan Hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi hal demikian, maka cara yang ditempuh bank dalam rangka memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Namun ada juga beberapa bank yang menggunakan cara yang lebih halus yaitu dengan membuat perjanjian perdamaian dengan pihak debitur (Dading) di hadapan notaris. Cara ini ditempuh oleh kreditur karena kreditur menganggap bahwa debitur masih bisa diajak berkomunikasi dan debitur menyatakan kesanggupannya untuk membayar hutang walaupun dengan tenggang waktu yang akan ditentukan bersama antara debitur dengan pihak bank.

Upaya lain yang dilakukan oleh bank apabila debitur wanprestasi namun eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan adalah

<sup>10</sup> Wawancara ke PN Semarang, tanggal 7 Juni 2002



berupa mengambil benda jaminan untuk pembayaran hutang dilakukan terhadap benda bergerak tidak bertubuh ( piutang ) yang berupa deposito atau tabungan.

Tindakan berupa penjualan di bawah tangan juga dilakukan oleh bank, terhadap benda jaminan yang berupa benda bergerak bertubuh maupun terhadap hak-hak atas tanah yang telah diikat dengan perjanjian jaminan. Penjualan di bawah tangan diawali dengan upaya bank atau debiturnya mencari pembeli benda jaminan, dilanjutkan dengan jual beli di bawah tangan terhadap benda jaminan antara debitur dengan pembeli didampingi oleh bank.

Tindakan yang berupa pengajuan gugatan dilakukan oleh Bank bila permohonan eksekusi benda jaminan pada ketua Pengadilan Negeri tidak berhasil. Hal demikian dikarenakan Bank tidak menyenangi upaya penagihan hutang dengan cara pengajuan gugatan yang dapat memakan waktu lama dan biaya.

Namun tentunya sebelum Bank melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan hutang dengan cara tersebut di atas, maka Bank terlebih dahulu mengadakan dan melakukan upaya-upaya penyelamatan sebagai berikut :

1. Penjadwalan Kembali (Reschedulling) yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit.
2. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang TIDAK HANYA terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan

tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian kredit.

3. Penataan Kembali ( Restrukturing ), yaitu suatu upaya dari bank yang melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equality perusahaan.

#### **B5. Analisa Kasus dan Solusi**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai kalangan yaitu pihak Bank sebagai kreditur, para praktisi hukum dalam hal ini notaris dan Pengadilan Negeri Semarang melalui wawancara dan studi kepustakaan maka di dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan mengenai grosse akta pengakuan hutang. Bahwa menurut teori dan kenyataan sangatlah berbeda.

Faktor penghambat pertama dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang adalah mengenai terjadinya perselisihan atas jumlah hutang. Untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai jumlah hutang, maka :

- a. Jumlah hutang tidak diperselisihkan, Ketua Pengadilan Negeri dilarang menilai.

Kalau jumlah hutang tidak diperselisihkan, Ketua Pengadilan Negeri dilarang menilai jumlah hutang. Misalnya, pihak kreditur meminta eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan jumlah tagihan yang diajukannya sebesar yang tercatat dalam rekening pembukuan atau jumlah tagihan yang diajukan sebesar yang tercantum dalam grosse akte dan

debitur tidak mengajukan keberatan atas jumlah yang dikemukakan kreditur maka dalam kasus yang demikian Ketua Pengadilan Negeri :

- dilarang menilai kebenaran jumlah hutang,
- dan eksekusi harus dijalankan sesuai dengan besarnya jumlah hutang yang diajukan kreditur.

- b. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menilai dan menentukan jumlah hutang yang diperselisihkan dalam akta pengakuan hutang. Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh diam. Sebagai orang yang berfungsi memimpin eksekusi, harus mampu memberi jalan penyelesaian dengan jalan memilih alternatif hukum yang paling tepat sesuai dengan pilihan hukum yang dibenarkan karena dalam menghadapi perselisihan jumlah hutang dalam eksekusi grosse akta banyak pilihan hukum sebagai alternatif. Sebagai seorang yang berfungsi memimpin eksekusi, dia harus lebih dulu menjawab tantangan perselisihan dengan cara memilih alternatif yang dapat menyelesaikan eksekusi itu sendiri, sedang pilihan terhadap kaidah non eksekutabel, harus dipergunakan sebagai pilihan terakhir setelah sungguh-sungguh tidak dimungkinkan alternatif lain.

Adapun cara dalam menilai perselisihan jumlah hutang dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan alternatif penyelesaian, yaitu :

- Pertama ; perhitungan tetap bertitik tolak pada jumlah hutang yang ditetapkan dalam grosse akta.

Cara inilah alternatif utama menentukan jumlah hutang apabila terjadi perselisihan antara kreditur dengan debitur. Cara bertindak yang demikian masih benar-benar dalam jalur hukum, karena prinsip ini diatur secara umum dalam pasal 1176 KUH Perdata.

Berdasar prinsip yang diatur dalam pasal 1176 KUH Perdata, tersirat makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- pengadilan diwajibkan mempercayai jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang
- oleh karena itu jumlah hutang yang tertulis dalam akta (ditambah dengan perhitungan bunga), maka jumlah pengakuan hutang itulah yang ditetapkan sebagai hutang debitur.
- Tetapi alternatif ini baru dapat dijadikan sikap tindakan apabila tidak ada diketemukan fakta yang membenarkan adanya pembayaran angsuran.

Jadi, kalau terjadi perselisihan mengenai jumlah hutang antara kreditur dengan debitur, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan jumlah hutang yang disebut dalam grosse akta pengakuan hutang dan jumlah itulah yang ditetapkan sebagai hutang debitur.

Tindakan menentukan alternatif jumlah hutang berdasar jumlah yang ditulis dalam akta pengakuan hutang, harus lebih dulu dikaitkan dengan fakta. Adakah atau tidak diketemukan fakta yang mendukung bantahan debitur mengenai ketidakbenaran jumlah yang disebut dalam

akta pengakuan hutang. Jika sama sekali tidak ada fakta yang mendukung bantahan debitur, barulah alternatif ini dapat diterapkan.

- Kedua ; jumlah hutang yang ditetapkan sebesar yang dicantumkan dalam akta pengakuan hutang dikurangi dengan jumlah pembayaran yang didukung dengan bukti pembayaran.

Pada alternatif pertama sudah dijelaskan, Ketua Pengadilan Negeri berwenang dan dapat menentukan secara murni jumlah hutang sebesar yang disebut dalam akta pengakuan hutang atas jumlah hutang yang diperselisihkan, apabila bantahan yang diajukan debitur tidak didukung fakta. Atau fakta yang diajukan dianggap Ketua Pengadilan Negeri tidak bernilai sebagai alat bukti. Sebaliknya, apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai sedemikian rupa kuatnya fakta yang diajukan debitur, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerapkan alternatif perhitungan :

- jumlah yang ditulis dalam akta pengakuan hutang dikurangi dengan jumlah pembayaran yang didukung fakta,
- dan jumlah inilah yang akan dieksekusi,
- sekiranya pihak kreditur tidak merasa puas atas perhitungan eksekusi yang demikian, kreditur dianjurkan mengajukan gugat perdata biasa terhadap jumlah selebihnya.

Dengan cara penerapan yang seperti ini, pilihan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan hukum. Karena Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang berfungsi memimpin eksekusi, telah

mengeksekusi jumlah hutang yang pasti berdasar penilaiannya. Keberatan pihak kreditur dalam hal ini, tidak menjadi hambatan eksekusi grosse akte sebab sepanjang jumlah yang dianggap kreditur belum terpenuhi, masih terbuka jalur upaya hukum, melalui gugat perdata biasa.

- Ketiga ; dapat menjalankan atau menunda eksekusi apabila jumlah hutang yang tercantum dalam pembukuan kreditur diperselisihkan.

Apa yang dijelaskan pada alternatif pertama dan kedua ialah mengenai perselisihan jumlah hutang yang tercantum dalam grosse akte pengakuan hutang. Pada bagian ini akan diuraikan cara menentukan pilihan hukum apabila jumlah hutang yang diperselisihkan jumlah yang terdapat dalam rekening pembukuan :

Apabila pihak debitur keberatan tentang jumlah hutang yang terdapat dalam rekening pembukuan kreditur, pengadilan dapat menilai dan untuk selanjutnya memilih alternatif penyelesaian sebagai berikut :

- c. Menentukan jumlah hutang yang tercantum dalam rekening pembukuan.

Inilah pilihan pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1176 ayat (2) KUH Perdata yang membenarkan perumusan klausul dalam perjanjian kredit bahwa pihak debitur akan tunduk sepenuhnya terhadap jumlah perhitungan yang terdapat dalam rekening pembukuan kreditur.

Akan tetapi untuk menerapkan alternatif ini, pengadilan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain yang terpenting :

- faktor perhitungan yang masuk akal.

maksud faktor perhitungan yang masuk akal ialah jumlah yang terdapat dalam rekening pembukuan, benar-benar jumlah yang masuk akal dihubungkan dengan :

- realisasi hutang yang sebenarnya,
- ditambah dengan perhitungan yang diperjanjikan,
- serta dikaitkan dengan jangka waktu yang berjalan.

d. Menetapkan jumlah yang terdapat dalam akta pengakuan hutang.

Sekiranya jumlah hutang yang terdapat dalam pembukuan dinilai Ketua Pengadilan Negeri meragukan oleh karena ada faktor jumlah yang kurang masuk akal atau ada fakta pembayaran angsuran, dia dapat menentukan jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang sebagai pilihan hukum. Cara bertindak menerapkan jumlah hutang yang tercantum dalam akte pengakuan hutang, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam pasal 1176 ayat ( 1 ) KUH Perdata. Yakni menetapkan jumlah hutang yang dianggap pasti besarnya seperti apa yang tertulis dalam akte pengakuan hutang.

- Menetapkan jumlah hutang yang terdapat dalam rekening pembukuan dikurangi dengan jumlah pembayaran cicilan yang didukung oleh tanda bukti pembayaran setelah meminta bantuan kepada akuntan publik.

Alternatif selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan jumlah hutang sebesar jumlah yang tercantum dalam rekening pembukuan

kreditur dikurangi dengan jumlah pembayaran cicilan yang didukung oleh tanda bukti pembayaran.

Akan tetapi sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan untuk menetapkan jumlah yang demikian, dia harus menyadari bahwa dirinya sendiri bukan orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu ditinjau dari segi pelaksanaan hukum yang lebih objektif, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri lebih dulu mengambil langkah-langkah pendekatan yang memadai untuk itu :

- lebih dulu mempertemukan pihak kreditur dan debitur dan dibuat berita acaranya
- sesudah itu, jika dari hasil pertemuan itu tidak diketemukan kesepakatan, Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada akuntan publik untuk meng-audit rekening pembukuan yang dimiliki kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Faktor penghambat yang kedua dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang mengenai materi dari grosse akta pengakuan hutang. Menurut Fatwa MA, Pengakuan Hutang berisikan pernyataan pengakuan berhutang jumlah tertentu oleh debitur kepada kreditur dengan perumusan semata-mata kewajiban untuk membayar / melunasi sejumlah yang tertentu, dan tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

---

<sup>11</sup> Media Notariat no 8-9 tahun III Okt. 1988, h. 145-149



Letak permasalahannya yaitu bagaimana jika ada cara pelunasan dengan mengangsur, opeisbaarheid (keadaan default), jaminan. Apakah hal-hal tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai persyaratan lain ?

Yang menjadi persoalan dewasa ini adalah apakah suatu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk pengakuan hutang dan dibuat secara notariil dapat dimintakan grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan dalam Ps. 224 HIR.

Berdasar penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, dapat diketahui bahwa kalangan Pengadilan Negeri Semarang menganut pandangan yang sempit mengenai Pengakuan Hutang. Persyaratan-persyaratan seperti denda, bunga dan jaminan tidak boleh ada dalam suatu Pengakuan Hutang.

Berbeda dengan pendapat dari kalangan Pengadilan, maka para notaris berpendapat bahwa ketentuan mengenai angsuran, bunga, denda dan jangka waktu diperbolehkan karena merupakan persyaratan yang lazim dalam Pengakuan Hutang.<sup>12</sup>

Berdasar seminar Grosse yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 24 – 25 September 1987, Pengakuan Hutang selain memuat jumlah hutang yang pasti / mudah ditentukan juga memuat pernyataan debitur yang setuju bahwa jumlah hutang berdasar perhitungan kreditur yang memuat besarnya suku bunga, jangka waktu pelunasan, cara pembayaran, opeisbaarheid ( kapan dapat ditagih dan harus dibayar seketika ) serta memuat jaminan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid h.58

<sup>13</sup> Media Notariat No. 8-9 Tahun III – Oktober 1988, h. 163

Bahkan apabila kita melihat Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 41, ditentukan bahwa grosse dapat diberikan dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapan notaris. Sehingga jelaslah bahwa berdasar per-UU-an yang berlaku, notaris berwenang bahkan wajib ( Pasal 41 jo Pasal 7 PJN ) atas permintaan dari yang berkepentingan untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapan notaris.

Dengan melihat ketentuan Pasal 41 jo Pasal 7 PJN tersebut maka perjanjian kredit, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya dapat dibuatkan grossenya.

Menurut penulis, agar tidak terjadi lagi perbedaan pandangan dan penafsiran maka sebaiknya diambil jalan tengah yang bersifat moderat yaitu dengan diadakannya model pengakuan hutang yang memenuhi kebutuhan perbankan dan juga memenuhi Fatwa MA sehingga grosse akta pengakuan hutang tetap eksekutable.

Sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmaja, SH dalam Seminar Nasional tahun 1986 bahwa akta pengakuan hutang dimodifikasi dengan suatu perjanjian kredit. Bahwa pengakuan hutang memuat persyaratan yang menunjuk pada pembukuan bank, sehingga dengan demikian bila persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit dimasukkan maka menentukan jumlah hutang pun menjadi lebih mudah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Media Notariat No 8-9 Tahun III Oktober 1988, h. 167

Menurut penulis juga, sebaiknya kalangan Pengadilan memberi kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk menentukan jumlah hutang debitur berdasar bukti-bukti dari kedua belah pihak, karena ada juga bank yang menyediakan plafon kredit yang dapat diambil debitur dengan persyaratan tertentu dimana diperjanjikan bahwa hutang debitur dapat dibuktikan jumlahnya dari rekening koran yang dibuat oleh kreditur.

Sebagai implikasi dari kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

#### **Saran**

1. Dibandingkan dengan penagihan piutang, melalui permohonan eksekusi benda jaminan maka penagihan piutang melalui permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah langka. Karena ketentuan Pasal 224 HIR dan Fatwa MA kurang jelas terutama mengenai syarat dan materi dari suatu grosse akta pengakuan hutang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghambat jalannya eksekusi. Selain itu ketentuan Pasal 224 HR juga telah ketinggalan zaman karena merupakan warisan zaman penjajahan Belanda sedangkan negeri Belanda sendiri telah menciptakan berbagai perundang-undangan yang baru. Maka pada masa perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin maju dan menuntut efisiensi di segala bidang terutama bidang perkreditan, sangatlah dibutuhkan peraturan yang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Untuk itu seyogyanya MA segera mengeluarkan peraturan baru mengenai grosse akta pengakuan hutang sehingga pelaksanaan penagihan piutang dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang dapat terealisasi lebih cepat.

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. Bagi para praktisi hukum dan kalangan hukum pengadilan seyogyanya memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering terjadi pada grosse akta pengakuan hutang dan memberikan pendapatnya untuk mendapatkan solusinya.
3. Partisipasi dan dorongan dari perbankan terutama dari Bank Indonesia sangat diharapkan agar model akta pengakuan hutang yang memenuhi kebutuhan perbankan terutama perjanjian kredit dapat segera direalisasi dan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni Bandung, 1983.
- A. Pitlo, *Pembukuan dan Daluwarsa*, PT. Intermasa Jakarta, 1978
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1987.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek oleh Bank*, Rineka Cipta.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 1998.
- Ign. Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit UNDIP.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1983.
- Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum. Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Mgs. Eddy Putra Tje man, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung 1996.
- Munir Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Jakarta, 1989.
- R.M.J. Koosmargono & Moch. Djais, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit UNDIP.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985.

Rustam Effendy, *Kedudukan dan Fungsi Jaminan Kredit Bagi Bank*.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1984.

Victor M. Situmorang & Cormentya S., *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta.

### **B. Majalah-Majalah / Undang-Undang**

GHS. Lumban Tobing, *Kedudukan Grosse Akta Notaris Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Dewasa Ini*, Media Notariat No. 26-27 Januari – April 1987.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9, 1988.

Subagio Reksodipuro, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9, 1988.

Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13, 1989.

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta.

Soerjono Soekanto, *UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.